

Strategi Bertahan Hidup Pedagang Kaki Lima (PKL)

Muhammad Hayat

Dosen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Universitas Muhammadiyah Malang (UMM)

Alamat email: hayato.hayat@gmail.com

Abstract

Indonesian development policy which tends to focus on the growth model has implied on the high concentration of city development. Cities, in fact, finally become spaces where city dwellers and city new comers tightly complete each other to grab the available capital. The qualified new comers who possess good competence are able to survive in the city. Those people will be able to enjoy the delicious economic cakes which are abundantly scattered. However, the incompetent new comers may only taste the remnants of the economic cake. That is the most rational choice for the incompetent. According to Max Weber, this phenomenon shows an instrumental social action. It means that the measurement of profit and loss has been the most important part of their actions.

Indeed, most of the new comers do not have special competence. They only depend on their physical strength in order to survive. In Karl Marx's terminology, an individual who does not possess an ability to control the production factors (for example: natural resources, human resources, capital) will only depend on their body (physical strength) in order to survive. Therefore the informal sectors become the most rational choice. Hence street vendors, construction workers, parking attendants and other informal jobs have been the common views in the cities.

This paper is trying to portray one of the informal sectors in the cities namely street vendors. Their survival strategy in the competitive city life is a point of view which is being explained and focused in this paper.

Keywords: *Survive strategy, Informal sector, solidarity*

Pendahuluan

Model pembangunan Indonesia yang menitikberatkan pada pertumbuhan, berimplikasi pada terkonsentrasinya pembangunan di daerah perkotaan. Kota yang merupakan sebagian kecil dari luas wilayah Indonesia, pada akhirnya menjadi arena perebutan kapital bagi masyarakat. Tidak cuma masyarakat kota tetapi juga masyarakat pinggir kota dan desa

berlomba-lomba untuk bersaing memperebutkan kue ekonomi tersebut. Ketidakteraturan persebaran pembangunan menjadi pemandangan jamak dalam geliat pembangunan. Kota pada akhirnya tidak punya kemampuan untuk menjalankan misinya sebagai penyelamat nilai *human*. Apalagi jika kita menelisik pada kesejarahan kota di negara berkembang dan juga kota-kota di Indonesia, pada umumnya

memang tidak didesain sebagai kota perdagangan dan industri.

Menurut J.H. De Goede kota-kota itu tumbuh di sekitar benteng militer, pos perdagangan dan pusat-pusat kedudukan badan politik/administrasi. Lebih-lebih pada awal jaman kolonial pembangunan sektor industri dari perekonomian kota tidak banyak mendapat perhatian¹. Dalam kasus Indonesia model kota tipe kolonial Belanda adalah bersinggungan dengan pusat-pusat kedudukan badan politik/administrasi. Sebelah Utara adalah kediaman pengelola kota (Bupati), sebelah selatan pusat bisnis, sebelah timur pusat pemerintahan, sementara sebelah barat tempat masyarakat tinggal (biasanya disebut dengan kauman).

Prototipe kota yang seperti itu berimplikasi pada ketidamampuannya untuk menampung gelombang kedatangan manusia yang mengadu peruntungan kapital. Daerah yang terletak di sebelah selatan dari pusat kota yang dijadikan pusat bisnis biasanya langsung dihubungkan dengan jalan raya sehingga sebagai arena untuk berkumpul banyak orang dengan satu kepentingan yang sama yaitu pencarian sumber ekonomi menjadi tidak bisa berjalan dengan baik. Apalagi kota di Indonesia yang tumbuh pada jaman Belanda pada dasarnya tidak didesain untuk pusat perdagangan, sehingga mengalami kegagapan manakala terjadi serbuan masyarakat pinggiran untuk mengais untung di kota.

Pendatang yang mempunyai keahlian khusus mungkin bisa mendapatkan pekerjaan dan dapat mengeruk kapital besar untuk menaikkan derajat status mereka. Tetapi bagi pendatang yang cuma berbekal tubuh secara fisik tanpa dibekali

kompetensi tertentu pada akhirnya akan melakukan apa saja untuk bisa mempertahankan diri di kota. Celaknya hampir sebagian besar pendatang cuma berbekal tubuh fisiknya saja. Muara akhirnya pekerjaan-pekerjaan informal menjadi alternatif yang paling rasional untuk dilakukan. Tubuh sebagai faktor produksi dijadikan tumpuan untuk menyambung hidup. Wajah sektor informal seperti tukang semir sepatu, tukang becak, tukang parkir, preman, pedagang kaki lima, dan lain-lain menjadi pemandangan yang jamak kita temukan di sudut-sudut kota. Wajah tersebut bersanding dengan geliat massif pembangunan industri, rumah mewah, mall, maupun gedung pencakar langit.

Dalam kasus Indonesia, sektor informal mengalami derajat kenaikan yang menajam selepas krisis ekonomi tahun 1997. Hal ini diakibatkan ambruknya perusahaan-perusahaan besar yang diiringi dengan PHK besar-besaran. Menurut Mudrajat Kuncoro ada tiga sektor yang mengalami dampak yang sangat parah. Pertama, perusahaan skala besar yang banyak bermain di pasar global untuk bermain valas, saham, obligasi, dan off-shore loans. Perbankan, pasar modal, dan properti terbukti yang paling menderita akibat krisis saat itu. Kedua, sektor publik yang banyak berutang luar negeri juga terkena dampak krisis. Ketiga, importer atau pelaku bisnis yang kandungan impor bahan baku /penolongnya tinggi.²

Masih menurut Mudrajat Kuncoro, krisis pada tahun 1997, Indonesia mengalami depresiasi rupiah sebesar 100%, tingkat inflasi sebesar 20%, kredit macet perbankan sebesar 60%, suku bunga SBI

¹ Schoorl, W.J., *Modernisasi Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara-Negara Sedang berkembang*, (Jakarta: Gramedia, 1988), hlm. 263.

² Kuncoro, Mudrajat, *Ekonomika Pembangunan*, (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm. 72.

sebesar 50%.³ Pemandangan jamaknya adalah munculnya orang-orang miskin baru di kota maupun desa. Pada akhirnya pilihan pekerjaan informal menjadi ruang baru untuk menyelamatkan kehidupannya.

Paper ini mencoba memfokuskan pada salah satu pekerja informal kota yaitu pedagang kaki lima. Sebagai kelompok marjinal kota, sangat menarik untuk melihat mereka mempertahankan hidupnya di kota dengan segala konsekuensinya. Sementara tujuan dari paper ini adalah mencoba menelisik lebih jauh bagaimana mereka berstrategi agar tetap bisa hidup dan mempertahankan diri di tengah persaingan yang luar biasa keras di kota.

Strategi Pedagang Kaki Lima Mempertahankan Hidup

Kota di Indonesia yang akhirnya bertumbuh seiring dengan dinamika sosial masyarakatnya, sejatinya masih sangat angkuh buat pendatang yang tidak punya kekuatan ekonomi, kemampuan pikir maupun kompetensi lainnya. Kota yang tumbuh dalam ruang ekonomi hampir dipastikan cuma menjadi ruang kontestasi bagi penguasa-penguasa kapital. Sering kita dengar, sebuah lokasi di kota yang menurut rencana tata ruang dan wilayah (RT/RW) sejatinya bukan daerah bisnis melainkan sebagai daerah resapan air, tetapi karena kemampuan penguasa kapital mengendalikan penguasa kota menjadikan dengan sangat mudahnya lokasi tersebut di sulap menjadi wilayah bisnis. Akhirnya ruang kota cuma didesain bagi pemenuhan syahwat konsumsi belaka. Manakala ribuan migran beradu nasib di kota, yang bisa mereka lakukan cuma mengais remah-remah kapital yang tercecer dalam bentuk pekerjaan-pekerjaan

marjinal yang memang diperuntukkan untuk hirarki terendah dalam piramida masyarakat kota. Pekerjaan yang marjinal (dalam hal ini pekerjaan informal lebih spesifiknya pedagang kaki lima) maka ruang kota begitu kejam untuk selalu menjadikan mereka sasaran utama penertiban kota. Dalam pandangan penguasa kapital carut marut keindahan kota tidak bisa dilepaskan dari wajah kotor dan buram dari kelompok informal ini. Secara sosiologis bisa dipahami, jika munculnya aturan yang berkaitan dengan perencanaan kota seringkali merupakan ruang berkelindannya penguasa kota dengan penguasa kapital. *No way out* atau tidak ada jalan keluar buat pekerja informal (pedagang kaki lima) menjadikan merekapun harus melakukan siasat sedemikian rupa agar tetap bisa bertahan dan dalam batas-batas tertentu bisa bersaing memperebutkan kue ekonomi yang lebih besar lagi. Berikut beberapa strategi yang dilakukan oleh pedagang kaki lima dalam usahanya bertahan hidup.

Bangunan ekonomi dihadapi secara *subsistence*

Sebagai kelompok yang sejatinya tidak diinginkan oleh pengambil kebijakan kota, mereka harus tetap bisa menghidupi dirinya sendiri. Menurut Didik J. Rachbini dan Abdul Hamid hal tersebut disebabkan kebijakan pembangunan yang tidak diikuti oleh kesadaran untuk memberikan peluang dan suasana yang mendukung mereka yang bergerak di sektor informal sehingga tidak memungkinkan bagi mereka untuk berpartisipasi.⁴ Lebih jauh Didik dan Hamid menambahkan bahwa proses informalisasi dari kegiatan ekonomi mereka dapat dipandang sebagai upaya untuk *survive*, paling tidak untuk memenuhi kebutuhan yang paling mendasar. Bagi

³ *Ibid*, hlm. 72-73.

⁴ Rachbini, J, Didik, dan, Hamid, Abdul, *Ekonomi Informal Perkotaan*, (Jakarta: LP3ES, 1994), hlm. 8.

pedagang kaki lima bisa melakukan aktivitas bekerja setiap harinya adalah bagian dari cara mereka mempertahankan diri untuk bisa menyambung hidupnya. Menurut mereka itulah cara yang bisa dilakukan sehingga mau tidak mau harus dijalankannya. Walau mungkin dengan pendapatan yang cuma bisa digunakan untuk keperluan sehari-hari (*subsistence*). Hal ini seperti yang dikatakan oleh Umar penjual pempek yang biasa mangkal di daerah kost yang cukup padat yaitu Karangbenda:

"Dengan menjadi penjual pempek setiap hari saya bisa mendapat penghasilan."
(Karangbenda, Depok, Sleman, 21 Juni 2011)

Pernyataan yang hampir senada disampaikan oleh Bapak Sutikno, penjual jagung rebus, pisang rebus, ubi jalar rebus, dan kacang rebus yang biasa berdagang di pojok jalan daerah Karangbenda:

"Kalau menjadi buruh bangunan kan belum tentu setiap hari bekerja. Dengan jualan seperti ini setiap harinya pasti saya dapat uang. Walau mungkin tidak sama setiap harinya. Tetapi saya kan tetap bekerja setiap harinya." (Karangbenda, Depok, Sleman, 22 Juni 2011)

Dari pernyataan yang disampaikan oleh dua pedagang kaki lima tersebut terlihat jika mendapatkan penghasilan yang cuma cukup untuk kebutuhan yang paling mendasar yaitu untuk bisa sekedar menyambung hidup bagi mereka adalah sudah cukup. Seperti yang dikatakan oleh S.V. Sethuraman, mereka yang terlibat dalam sektor ini pada umumnya miskin, berpendidikan sangat rendah, tidak trampil dan kebanyakan para migran, jelaslah bahwa mereka bukanlah kapitalis

yang mencari investasi yang menguntungkan dan juga bukan pengusaha seperti yang dikenal pada umumnya. Cakrawala mereka nampaknya terbatas pada pengadaan kesempatan kerja dan menghasilkan pendapatan yang langsung bagi dirinya sendiri⁵.

Dalam tafsir sosiologis, hal tersebut bisa dipahami dari kacamata piramida masyarakat kota. Piramida masyarakat kota menempatkan pedagang kaki lima berada pada struktur paling bawah. Oleh karena itu mereka harus bisa mempertahankan hidupnya sedemikian rupa. Hal ini dikarenakan mereka adalah kelompok masyarakat yang tidak punya kemampuan akses apapun. Baik akses ekonomi, politik, hukum maupun lainnya. Alat produksi yang mereka miliki hanya sebatas tenaga sehingga dengan tenaga itulah mereka mencoba mempertahankan diri. Mereka sangat paham jika tenaga lama kelamaan akan mengalami penyusutan kapasitas, sehingga memaksimalkan pekerjaan adalah cara yang paling rasional yang bisa mereka lakukan. Logika *subsistence* menjadi cara hidup yang terpaksa harus dipilihnya dan merupakan cara untuk mempertahankan diri.

1. Mengerucut menjadi kelompok dengan kearifan-kearifan solidaritas mekanik

Solidaritas mekanik dalam terminologi Emile Durkheim dipahami sebagai sebuah entitas yang mengembangkan ketahanan kelompok sosialnya dengan bangunan kesadaran kolektif. Menurut Emile Durkheim dalam Kamanto Sunarto, kesadaran kolektif merupakan suatu kesadaran bersama yang mencakup keseluruhan kepercayaan dan perasaan kelompok, dan bersifat ekstern serta memaksa. Sanksi terhadap pelanggaran

⁵ Manning, Chris, dan, Effendi, Noer, Tadjuddin, *Urbanisasi, Pengangguran, dan Sektor Informal Kota*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1996), hlm. 90.

hukum di sini bersifat represif; barang siapa melanggar solidaritas sosial akan dikenai hukuman pidana. Kesadaran bersama tersebut mempersatukan para warga masyarakat, dan hukuman terhadap pelanggar aturan bertujuan agar ketidakseimbangan yang diakibatkan oleh kejahatan tersebut dapat dipulihkan kembali.⁶ Kelompok sosial seperti ini menempatkan kebersamaan, imunitas nilai kelompok menjadi bagian penting cara mereka bersikap maupun bertindak. Oleh karena itu bisa dipahami jika *social fact* atau fakta sosial menjadi komitmen utama mereka. Akhirnya yang dirasakan oleh setiap anggota kelompok adalah perasaan senasib dan sepenanggungan.

Komitmen seperti ini bisa menjadi ranah tindak bagi mereka disebabkan sebagai kelompok sosial dari masyarakat kota yang sejatinya tidak diinginkan oleh komunitas *mainstream* kota, secara sosiologis bisa dipahami jika mereka dianggap *liyan* oleh penghuni utama kota. Mereka pun akhirnya me-*liyan*-kan diri atau menjadi *the others* bagi kota. Sebagai *the other* memproduksi nilai-nilai bersama yang harus dijaga erat adalah hal yang paling rasional untuk dilakukan. Dengan cara seperti itu mereka merasa bisa untuk bertahan dalam kerasnya kehidupan kota. Bisa dipahami jika saling percaya (*trust*) bagi mereka adalah barang yang sangat berharga. Sebagai contoh adalah apa yang dilakukan oleh Ibu Karti, penjual jamu gendong yang mangkal di depan Pasar Demangan, Yogyakarta. Dia bisa dengan santainya meninggalkan barang dagangannya untuk waktu yang cukup lama dan dititipkan ke Ibu Nur yang jualan kue basah. Dan manakala ada orang yang membeli jamu. Ibu Nur dengan suka rela akan menjualkannya.

Begitu pula sebaliknya. Ibu Karti juga melakukan hal yang sama untuk pedagang gula merah yang berdagang di samping Bu Karti. Bagi mereka saling membantu teman sesama pedagang adalah bagian dari rutinitas mereka sehari-hari. Seperti yang disampaikan oleh ibu yang berasal dari Sukoharjo, Surakarta:

"Ya beginilah bantu membantu diantara kami. Saya tadi baru menjualkan gula merah. Kebetulan penjualnya sedang ada perlu. Dia ya percaya saja sama saya. Ya memang kita saling percaya. Jadi tidak pernah ngapusi." (Pasar Demangan, Yogyakarta, 22 Juni 2011)

Kemampuan untuk menempatkan trust sebagai bagian penting pola interaksi di antara mereka menunjukkan bahwa secara sosiologis mereka sudah bisa dianggap sebagai sebuah kelompok yang derajat interaksinya sudah saling mendefinisikan. Menurut Robert King Merton, tiga kriteria objektif bagi suatu kelompok. Pertama, kelompok ditandai oleh sering terjadinya interaksi. Kedua, pihak yang berinteraksi mendefinisikan diri mereka sebagai anggota. Ketiga, pihak yang berinteraksi didefinisikan oleh orang lain sebagai anggota kelompok.⁷ Mendefinisikan berarti menempatkan individu dalam posisi yang sama sehingga yang akhirnya diproduksi adalah bangunan subjektifitas. Sebagai sama-sama PKL sejatinya mereka ada dalam posisi yang sama yaitu sama-sama tidak punya kuasa terhadap ruang dimana mereka berdagang. Ruang sempit yang mereka dapatkan harus mereka gunakan sebaik mungkin untuk kepentingan mendapatkan untung. Pedagang kaki lima tersebut sama-sama mendapatkan ruang yang sempit sehingga secara sosiologis mereka yang sebagian besar migran sehingga

⁶ Sunarto, Kamanto, *Pengantar Sosiologi*, (Jakarta: FEUI, 2000), hlm. 132.

⁷ Sunarto, Kamanto, *Pengantar Sosiologi*, (Jakarta: FEUI, 2000), hlm. 131.

cara beradaptasi dengan membangun social systemness adalah laku rasional yang harus dijalani. Menurut Deden Rukmana dalam www.jakartabutuhrevolusibudaya.com tentang teori perkotaan bahwa dalam sekolah Chicago sosiologi perkotaan yang dikembangkan pada awal tahun 1920-an menjelaskan perkembangan perkotaan dikendalikan oleh migrasi yang menghasilkan pola-pola ekologis seperti invasi, survival, asimilasi, adaptasi dan kerja sama. Pola-pola ekologis dalam bentuk adaptasi dengan lingkungan kota adalah membangun social systemness (kesisteman sosial) dengan kelompok-kelompok sosial yang secara determinan punya nasib yang sama dengan mereka (dalam hal ini sesama pedagang kaki lima). Social systemness memungkinkan mereka punya ketergantungan sosial yang tinggi dengan sesama PKL. Yang pada akhirnya adalah memudahkan mereka membangun social capital (modal sosial). Praktek saling membantu menjualkan adalah contoh nyata bahwa social capital sudah berjalan cukup sistematis di antara PKL. Sebagai sesama migran memberi ruang adaptasi dalam bangunan social systemness adalah logika instrumental agar mereka bisa menjadi kelompok yang kuat. Sehingga manakala ada perlawanan dari luar mereka bisa cukup punya kekuatan untuk mengatasinya.

Sementara pola ekologis dalam bentuk kerjasama yang dilakukan adalah membangun jejaring dengan kelompok sosial yang punya determinasi ekonomi yang sama. Determinasi ekonomi dipahami sebagai kemampuan untuk bisa memberikan nilai tambah terhadap apa yang dilakukannya selama ini. Tentunya mereka tidak ingin cuma sebatas itu saja kemampuan ekonominya. Karena kebutuhan hidup juga semakin besar seperti kebutuhan untuk makan sehari-hari, biaya sekolah anak, biaya sosial, dll. Karena itu kerjasama di antara pedagang kaki lima

biasanya adalah melakukan kegiatan ekonomi yang cukup produktif. Kegiatan arisan menjadi alternatif. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Nur penjual kue basah yang menjajakan dagangannya di Pasar Demangan Jogjakarta:

"Kita sesama pedagang mengadakan arisan. Sengaja dapatnya cukup besar. Karena untuk kebutuhan yang mendadak. 6 juta rupiah yang kami dapatkan dari arisan tersebut." (Pasar demangan, Yogyakarta, 22 Juni 2011)

Pernyataan hampir senada dikatakan oleh Ibu Karti. Penjual jamu gendong yang mempunyai empat anak ini berujar bahwa:

"Saya itu kebutuhannya banyak. Menyekolahkan anak. Menengok orangtua di kampung. Sumbangan-sumbangan dan lain sebagainya. Saya ikut arisan yang dapatnya 600 ribu dan 6 juta. Alhamdulillah lancar mbayarinya." (Pasar Demangan, Yogyakarta, 22 Juni 2011)

Dalam tafsir sosiologis, kerja sama dalam determinasi ekonomi menjadi cara mereka berkalkulasi dengan kehidupan yang memang semakin penuh risiko. Mereka tidak lagi cuma bisa berharap pada pemenuhan yang bersifat primer dan sekunder. Ada kebutuhan yang lebih yang harus dipenuhi. Anak mereka yang mau tidak mau harus disekolahkan berujung pada resiko kalkulasi ekonomi. Ketika berani berkalkulasi berarti harus berani mengambil risiko. Dalam pemahaman Ulrich Beck, modernisasi mengandung posisi risiko sosial. Jika kita melihat dalam kasus Indonesia, terlihat jelas jika modernisasi yang bertitik tolak pada pertumbuhan ekonomi ternyata cuma mengakibatkan kemiskinan dan ketimpangan sosial. Tetapi seperti yang dikatakan oleh Ulrich Beck bahwa ada posisi risiko sosial. Artinya orang miskin pun mendapatkan risiko dari modernisasi

itu sendiri. Karena modernisasi merujuk pada kalkulasi, maka pendidikan yang tumbuh di Indonesiapun atmosfernya adalah kalkulasi. Kalau mau masuk sekolah ya kalkulasi utamanya harus punya uang cukup. Pedagang kaki lima jika ingin menyekolahkan anaknya juga harus punya uang memadai. Dengan begitu pedagang kaki lima yang sudah susah hidupnya juga harus berkalkulasi lebih dalam lagi jika menginginkan anaknya bisa sekolah. Inilah yang menurut Ulrich Beck jika posisi risiko sosial menghantam keseluruhan struktur masyarakat. Tidak kaya, tidak miskin. Karena itu bisa dipahami jika Bu Karti pada kondisi tertentu harus mengambil risiko untuk berhutang guna memenuhi kebutuhan sekolah anaknya. Seperti yang dikatakannya berikut ini:

"Saya menyekolahkan anak-anak saya. La saya ini wong bodo. Ya tidak ingin anak-anaknya jadi bodo. Alhamdulillah yang pertama sudah lulus SMK. Sudah berkeluarga dan punya satu anak. Alhamdulillah juga sudah punya rumah. Tinggalnya di Jogja. Yang nomor dua setelah lulus SMK melanjutkan sekolah yang satu tahun dan sekarang memberi les-les. Dia tinggal di Surabaya. Yang nomor tiga masih SMK. Ini biayanya banyak. Baru saja saya mengeluarkan uang Rp 3 juta. Walaupun kadang harus dengan hutang tapi Alhamdulillah bisa lancar melunasinya. Adanya arisan menjadi cukup ringan. Yang paling kecil rencananya mau saya masukkan ke pesantren. Baru lulus SD sekarang. Ya memang abot tapi ya sekolah itu penting. Aja bodo kaya ibune".(Pasar Demangan, Yogyakarta, 22 Juni 2011)

Pernyataan dari ibu Karti menunjukkan bahwa determinasi ekonomi dan kerja sama dalam konteks ekonomi dengan sesama pedagang kaki lima merupakan

cara rasional untuk menutupi kebutuhan hidup yang semakin beragam.

2. Mempertahankan setiap jengkal ruang kota yang bernilai ekonomis

Pola ekologis dalam bentuk survival dari kelompok sosial yang berbasis *subsistence* tersebut, maka pedagang kaki lima akan memanfaatkan setiap jengkal ruang kota yang dianggap punya nilai ekonomis untuk mempertahankan hidupnya. Dalam pemahaman Max Weber rasionalitas instrumental yang lebih dikedepankan. Menurut Max Weber dalam Agus Salim bahwa rasionalitas instrumental merupakan bentuk rasional yang paling tinggi dengan unsur pertimbangan pilihan yang rasional sehubungan dengan tujuan tindakan itu dan alat yang dipilihnya⁸.

Bagi pedagang kaki lima, setiap jengkal tanah yang mereka gunakan untuk berdagang pada dasarnya adalah ruang ekonomi utama yang mereka miliki dan harus mereka pertahankan mati-matian. Pedagang kaki lima sebagai kelompok masyarakat yang *subsistence* melihat bahwa lapak tempat mereka berdagang adalah sarana untuk mewujudkan rasionalitas instrumentalnya sehingga apapun akan dilakukan untuk mempertahankan diri. Jika perlu dengan cara (alat) konflik.

Tempat berdagang merupakan *thing* yang sangat penting bagi pedagang kaki lima karena sejengkal tanah tempat mereka berusaha adalah satu-satunya cara mereka mempertahankan hidupnya di kota. Seringkali mereka menempati kawasan yang diklaim oleh pemerintah kota melanggar peraturan. Sementara, karena pedagang kaki lima yang berjualan di tempat tersebut sudah menjadi sebuah komunitas. Pengambil kebijakan kota tidak bisa serta merta mengusir mereka. Sebagai komunitas dengan keimunan nilai bersama tentunya menjadi riskan jika perlakuan kasar

⁸ Salim, Agus, *Perubahan Sosial*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002), hlm. 40.

menjadi cara dominan. Tarik menarik kepentingan yang akhirnya harus berujung pada konflik antara mereka seringkali menjadi pemandangan umum dalam penangan pedagang kaki lima. Ruang kota yang dalam piramida masyarakat kota seringkali dipahami hanya untuk masyarakat kota, berimplikasi sangat tidak menguntungkan bagi masyarakat migran. Kedatangan mereka ke kota untuk mencari kerja karena hampir semua *capital* desa tersedot ke kota (perampasan desa oleh kota) berujung pada ternafikannya mereka dari riuh rendahnya semangat perayaan ekonomi masyarakat kota. Sehingga bisa dipahami ketika masyarakat migran (pedagang kaki lima) sudah punya kekuatan sebagai sebuah kelompok sosial, seringkali berseteru dengan penguasa kota adalah cara yang harus mereka tempuh untuk mempertahankan diri.

3. Membentuk entitas kecil dalam komunitas yang biasanya seragam

Pola ekologis dalam bentuk invasi dari masyarakat yang ada di sekitar kota adalah terbentuknya entitas-entitas kecil yang biasanya berasal dari daerah yang sama. Persamaan geografis menjadi cara yang paling mudah bagi mereka untuk bisa lebih nyaman tinggal di daerah baru. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Umar, penjual pempek yang berasal dari Brebes. Menurutnya:

"kami ada sepuluh orang dari Brebes berjualan pempek di Jogja." (Karangbenda, Depok, Sleman, 21 Juni 2011)

Hal yang hampir senada disampaikan oleh Bapak Sutikno dari Bojonegoro. Beliau sehari-hari berjualan pisang rebus, jagung rebus, ubi jalar rebus, dan kacang rebus. Menurutnya:

"Ada 22 orang dari kelompok kami yang jualannya sama persis dengan saya." (Karangbenda, Depok, Sleman, 22 Juni 2011)

Hampir bisa dipastikan jika sebagian besar dari pedagang kaki lima itu berasal dari daerah yang sama. Yang lainnya adalah, pedagang angkringan yang mengadu nasib di Jogjakarta sebagian besar berasal dari Mbayat, Kalten, Jawa Tengah. Sementara penjual siomay rata-rata dari daerah seputar Magelang dan Wonosobo.

Dalam tafsir sosiologis, kedekatan daerah asal berimplikasi pada mudahnya interaksi sosial yang dijalin. Dalam terminologi Ferdinand Tonnies disebut sebagai *Gemeinschaft of place*, merupakan ikatan yang berlandaskan kedekatan letak tempat tinggal serta tempat bekerja yang mendorong orang untuk berhubungan secara intim satu dengan yang lain, dan mengacu pada kehidupan bersama di daerah pedesaan⁹. Kesamaan budaya menjadikan ekspresi yang dimunculkan lebih cair. Hal ini disebabkan perasaan yang senasib akan bermuara pada semakin kokohnya bangunan kelompok sosial.

Manakala bangunan kelompok sosial terproduksi secara wajar maka nilai-nilai sosial yang munculpun akan diapresiasi sebagai bentuk pertahanan sosial mereka. Maka akan sangat bisa dipahami jika sore-sore sekitar jam 4, jika kita melintas di daerah Karangbendo akan terdengar logat brebes yang kental dengan dialek banyumasnya menyeruak di sela-sela obrolan khas anak kost. Menurut Amran, seorang penjual pempek dari brebes:

"rasanya nyaman saja bisa kumpul bareng orang dari satu daerah. Seperti ada di daerah asal." (Karangbenda, Depok, Sleman, 21 Juni 2011)

⁹ Sunarto, Kamanto, *Pengantar Sosiologi*, (Jakarta:FEUI, 2000), hlm. 133.

Ikatan kolegal menjadi cara mereka bisa mempertahankan ritme hidup yang kadang memang harus diisi tidak cuma dengan ketegangan mencari uang, tetapi memberi kesadaran bahwa komunitas yang dibangun berdasarkan kesamaan geografis bisa menghidupkan ruang humanis. Kesamaan daerah asal juga merupakan cara bagaimana sinergi dalam wilayah ekonomi bisa dipikul bersama, sehingga keseimbangan ekonomi akan selalu terjaga. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Sutikno, penjual kacang rebus, pisang rebus dan lainnya ini mengatakan:

"Kadang saya juga perlu uang. Misalnya menengok anak dan istri di kampung. Saya merasa tidak malu untuk pinjam uang ke teman. Karena mereka kan dari daerah yang sama. Kita saling tolonglah." (Karangbenda, Depok, Sleman, 22 Juni 2011)

4. Ikut dengan orang yang punya modal

Banyak dari pedagang kaki lima yang barang dagangannya bukan merupakan barangnya sendiri, tetapi menjualkan milik orang lain. Bagi mereka cara ini lebih aman karena mereka tidak menanggung risiko rugi. Seberapapun barang terjual. Tetap saja mereka mendapatkan keuntungan. Seperti yang dikatakan Amran, pedagang pempek:

"Saya membawa pempek sebanyak 150 buah. Satu pempek yang saya jual 1000 rupiah, saya mengambil untung 300 rupiah. Jadi kalau laku semua saya bisa mendapatkan uang 45 ribu rupiah. Bagi saya yang tidak punya modal, ini mengenalkan. Selain itu saya juga tidak perlu kost, karena kami semua oleh juragan dikontrakkan rumah. Kalau makan tetap dari uang kami." (Karangbenda, Depok, Sleman, 21 Juni 2011)

Hal yang hampir senada juga dikatakan oleh Nur Rachim, penjual sio-may yang berasal dari Kepil, Wonosobo. Menurutnyanya:

"Satu bulan saya digaji 150 ribu rupiah. Dan setiap harinya saya mendapat 10% dari total penjualan. 10% nya ya sekitar 15 ribu. Tempat tinggal saya gratis." (Karangbenda, Depok, Sleman, 21 Juni 2011)

Bapak Sutikno, penjual pisang rebus juga memberi gambaran yang hampir senada. Menurutnyanya:

"Pokoknya saya harus menyetor sejumlah uang kepada juragan saya. Pokoknya bagaimana cari untung. Satu hari kalau laris bisa sampai dapat untung 50 ribu rupiah. Saya tinggalnya sudah ditanggung sama juragan." (Karangbenda, Depok, Sleman, 22 Juni 2011)

Dalam tafsir sosiologis, logika Max Weber tentang rasionalitas instrumental kelihatan sekali tergambar dari apa yang disampaikan oleh para pedagang kaki lima tersebut. Rasionalitas untung rugi menjadi laku tindak utama mereka. Karena itu mereka mengkalkulasi benar terhadap setiap tindakannya. Walau mungkin pendapatannya tidak terlalu besar berkisar 600 ribu sampai 1.500.000 rupiah. Tetapi mereka tidak harus menanggung tempat tinggal, yang sangat mungkin akan cukup banyak menguras pendapatan mereka. Berlindung di balik kuasa juragan bagi mereka tidak masalah, yang penting setiap harinya mereka bisa mengantongi keuntungan. Walau jika dikalkulasi bos atau juragan mereka mendapatkan keuntungan yang cukup besar. Bagi mereka yang untuk mempertahankan hidupnya cuma mengandalkan tubuh sebagai faktor produksi utama, pendapatan sebesar itu sudah mencukupi untuk logika-logika subsistence.

5. Mensiasati kebijakan aparat pemerintah

Menjadi pedagang kaki lima berarti harus berani bertaruh dengan aparat pemerintah. Biasanya adalah SatPol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) sebagai penegak ketertiban tata ruang kota. Dalam banyak kesempatan, cara-cara yang dilakukan SatPol PP kadang-kadang tidak memberi ruang dialog kepada pedagang kaki lima. Dari konteks seperti inilah mereka mencoba melakukan siasat-siasat tertentu agar bisa terlepas dari jeratan SatPol PP.

Jika kita berjalan-jalan ke sekitar Benteng Vredenburg di daerah Malioboro, Jogjakarta, kita seringkali melihat pedagang kaki lima yang menggelar barang dagangannya diatas sehelai kain yang dalam sekali lipat seluruh barang dagangan akan terlindungi oleh kain tersebut. Sehingga sangat mudah untuk ditenteng kemana-mana. Dari pengamatan itulah cara yang paling mudah untuk menyelamatkan barang dagangan manakala ada SatPol PP yang akan melakukan penertiban. Ada juga pedagang kaki lima yang menggunakan besi panjang yang sisi-sisinya dibuat gantungan untuk menempatkan barang dagangan. Hal semacam ini juga merupakan cara yang cukup ampuh untuk secepatnya menyelamatkan barang jika ada razia SatPol PP.

Ada juga pedagang yang menjajakan dagangannya di pintu masuk pasar yang tidak diperbolehkan untuk berjualan. Di Pasar Beringharjo Yogyakarta, berjualan di pintu masuk sebetulnya tidak diperuntukkan untuk berjualan. Tetapi jika kita masuk ke Pasar Beringharjo, sangat jamak kita melihat banyaknya pedagang yang berjualan di tempat tersebut. Karena inilah tempat yang sangat strategis menanggung untung. Sebab merupakan basis utama berlalu-lalangnya pengunjung pasar.

Seperti yang dikatakan oleh Bu Ratmi, penjual pecel yang berasal dari Jogjakarta. Menurutnya:

"Kita memang tidak boleh berdagang disini. Kalau satpam pasar melihat, kita akan disuruh masuk lagi ke dalam. Memang kita mendapat tempat untuk berjualan. Tetapi tempatnya di dalam. Dan ternyata tidak laku. Beda sekali jika kita berjualan di pintu masuk sini. Untungnya banyak. Jauh pokoknya perbandingannya. Pedagang yang lain juga merasa seperti saya. Akhirnya kita sering slintutan dengan satpam. Kalau tidak ada satpam kita langsung saja ngepos di pintu masuk sini." (Pasar Beringharjo, Yogyakarta, 21 Juni 2011)

Cara bersiasat yang dilakukan oleh pedagang kaki lima menunjukkan bahwa begitulah modalitas yang mereka punya. Dalam konteks ini, modalitas yang sedang mereka mainkan adalah human capital. Human capital dalam terminologi Anthony Giddens dipahami sebagai aktor aktif. Giddens beranggapan, bahwa para agen mereproduksi kondisi-kondisi yang memungkinkan keberadaan aktivitas-aktivitas itu¹⁰. Dalam kontek pedagang kaki lima, reproduksi yang dilakukan adalah kemampuannya membentuk jejaring di antara pedagang kaki lima sehingga menjadi tidak masalah walaupun harus bermain petak umpet dengan petugas keamanan. Itulah konsekwensi logis dari human capital yang cuma mengandalkan tubuh fisik untuk mereproduksi struktur. Oleh karena itu mereproduksi kondisi juga dengan jalan kemampuannya bersiasat terhadap arena dimana mereka melakukan interaksi sosial untuk kepentingan interest mereka. Dalam tafsir sosiologis, sekecil apapun kemampuan mereka mengakses ruang ekonomi, *interest* (kepentingan) tetap menjadi bagian paling mendasar

¹⁰ Giddens, Anthony, *Teori Strukturasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm 3.

dari cara manusia berinteraksi dengan manusia lain. Dia sedang menjadi aktor yang dengan statusnya sebagai pedagang kaki lima akan mencoba memerankan perannya sebaik mungkin sehingga *interest* atau kepentingannya bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkannya.

Penutup

Pedagang kaki lima sebagai kelompok marjinal dalam piramida masyarakat kota mempunyai posisi tawar yang sangat tidak menguntungkan. Mereka seringkali tidak dianggap sebagai entitas masyarakat kota sehingga seringkali ada pembenaran-pembenaran lewat produksi kebijakan yang muaranya adalah semakin menempatkan pedagang kaki lima dalam posisi yang semakin tertekan. Spirit semacam itulah yang akhirnya memunculkan wajah pedagang kaki lima sebagai kelompok sosial yang benar-benar *liyan* dalam budaya

masyarakat kota. Pada saat yang bersamaan mereka juga di-*liyan*-kan oleh ruang kuasa pemerintah kota. Justru ketidakbersahabatan kota inilah yang mengakibatkan mereka bisa membangun kelompok sosial dengan nilai-nilai mereka. Dengan begitu mereka bisa berstrategi dan bersiasat untuk bisa terus mempertahankan diri dan dalam batas-batas tertentu punya kemampuan mengambil remah-remah ekonomi yang lebih besar lagi. Suksesnya warung tegal menjadi bukti bahwa pedagang kaki lima tidak bisa dianggap remeh sebagai entitas baru kota.

Sudah saatnya penguasa kota memberi ruang yang semakin luas bagi pedagang kaki lima untuk berpartisipasi di ranah ekonomi. Bagaimanapun juga membanjirnya pedagang kaki lima ke kota tidak bisa dipisahkan dari timpangnya pembangunan kota desa sebagai imbas dari terhisapnya faktor produksi desa ke pusat-pusat kota.

Bacaan

Giddens, Anthony, 2010, *Teori Strukturalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Kuncoro, Mudrajat, 2010, *Ekonomika Pembangunan*, Jakarta: Erlangga

Manning, Chris, dan, Effendi, Noer, Tadjuddin, 1996, *Urbanisasi, Pengangguran, dan Sektor Informal Kota*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Rachbini, J, Didik, dan, Hamid, Abdul, 1994, *Ekonomi Informal Perkotaan*, Jakarta: LP3ES

Salim, Agus, 2002, *Perubahan Sosial*, Yogyakarta: Tiara Wacana

Schoorl, W, J, 1988, *Modernisasi Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara-Negara Sedang-Berkembang*, Jakarta: Gramedia

Sunarto, Kamanto, 2000, *Pengantar Sosiologi*, Jakarta: FEUI

Internet:

www.jakartabutuhrevolusibudaya.com/2008/04/03/pedagang-kakilima-dan-informalitas-perkotaan/, diakses pada tanggal 20 April 2011